

**DPRD TANPA PEREMPUAN:
KEGAGALAN CALEG PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF**

Anggun Putri Dayanti¹, Fitriyah²

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

**Jalan dr. Antonius Suroyo, Kampus Universitas Diponegoro, Tembalang
Semarang 50275**

anggunputridayanti@gmail.com

ABSTRACT

The case of the total failure of female legislative candidates in the legislative elections in the Mentawai Islands Regency in 2019 had an impact on the low involvement of women in influencing the policy process in parliament. Existing policies do not necessarily make it easier for women to enter parliament, what determines a candidate's success in political competition is the capacity to mobilize voters (society). This research uses a qualitative method with a case study approach. The theories used are political participation (Huntington and Nelson), modality failure factors (Pierre Bourdieu) and social culture. Data was collected based on the results of interviews with female legislative candidates, election Commissioners and the Mentawai community as voters. The selection of informants in this study used a purposive sampling technique.

The research results show that the failure of female legislative candidates in the 2019 legislative elections in the Mentawai Islands Regency was caused by several factors, including low social, economic and political capital capacity. So that women's self-confidence/motivation in political contestation becomes weak, and the final factor is the socio-cultural conditions of the Mentawai people which are less pro-women. It can be said that apart from external support, a candidate must first equip internal capacity to be able to persuade voters' (society's) decisions.

Keys Word : *Failure of Female Candidates, modality, Political Participation*

ABSTRAK

Kasus kegagalan total caleg perempuan pada pemilihan legislatif di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2019 berdampak pada rendahnya keterlibatan perempuan untuk mempengaruhi proses kebijakan di parlemen. Kebijakan yang ada tidak serta merta memudahkan perempuan masuk ke parlemen, yang menentukan lolosnya kandidat dalam kompetisi politik adalah kapasitas untuk memobilisasi pemilih (masyarakat). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan adalah partisipasi politik (Huntington dan Nelson), faktor kegagalan modalitas (pierre bordieu) dan sosial budaya. Data dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara kepada caleg perempuan, Komisioner KPU dan masyarakat Mentawai sebagai pemilih. Adapun pemilihan Informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan caleg perempuan pada pemilihan legislatif di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2019 disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kapasitas modal sosial, ekonomi, dan politik yang rendah. Sehingga kepercayaan diri/motivasi perempuan dalam kontestasi politik menjadi lemah, dan faktor terakhir adalah kondisi sosial budaya masyarakat Mentawai yang kurang berpihak pada perempuan. Dapat dikatakan selain dukungan eksternal, seorang kandidat harus memperlengkapi kapasitas internal terlebih dahulu untuk dapat memikat keputusan pemilih (masyarakat).

Kata Kunci : *Kegagalan Caleg Perempuan, Modalitas, Partisipasi Politik*

PENDAHULUAN

Keterlibatan perempuan di sektor publik mulai meningkat dengan adanya jaminan undang-undang tentang persamaan hak dan kebebasan berpartisipasi. Namun partisipasi dan keterwakilan perempuan di ranah politik khususnya lembaga parlemen masih rendah baik tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota (UNDP Indonesia, 2010). Partisipasi perempuan merupakan kegiatan sukarela individu atau kelompok untuk mempengaruhi proses kebijakan di Pemerintahan. Pentingnya perempuan berada di Parlemen bukan hanya pemenuhan kuota atau sekedar jumlah, namun untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang tidak dapat menentukan keputusan legislasi. Partisipasi perempuan sebagai calon legislatif di Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah memenuhi 30%, dapil 1 sebanyak 25 caleg, dapil 2 sebanyak 30 caleg dan dapil 3 sebanyak 35 caleg. Total caleg perempuan yang masuk DCT dalam Pileg Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2019 sebanyak 90 caleg dari 15 partai politik. Dalam pencalonan oleh masing-masing partai politik sudah memenuhi keterwakilan perempuan, namun untuk tingkat keterpilihan dalam pemilihan anggota legislatif tidak satu-pun terpilih. Berikut tabel terkait jumlah caleg terdaftar dan yang terpilih dalam Pileg 2019 di Kabupaten Mentawai.

Tabel 1 DCT dan caleg terpilih

	Jumlah caleg		Jumlah caleg terpilih	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
P	90	36%	0	0%
L	158	64%	20	100%

Sumber : KPU Kab.Kep Mentawai

Beberapa kebutuhan perempuan lebih baik dimengerti oleh mereka sendiri, kemudian dibawa dalam suatu rancangan kebijakan atau program pemerintah, berupa anggaran posyandu, kesehatan reproduksi, terkait program KB, harga sembako, kemiskinan dan kepedulian akan pendidikan anak, kelompok lanjut usia dan fenomena kekerasan seksual (Nuzula, 2017). Sehingga penting peningkatan keterwakilan perempuan di bidang politik khususnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai, supaya membuktikan adanya kesetaraan gender di mana baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kapasitas yang sama dalam menyelesaikan permasalahan negara. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengangkat rumusan masalah yaitu

bagaimana partisipasi politik caleg perempuan pada pemilihan legislatif dan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan caleg perempuan pada pileg di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2019.

Topik penelitian ini tentunya banyak diangkat oleh peneliti terdahulu, oleh karena itu peneliti mencari sumber-sumber naskah yang berkaitan dengan faktor penghambat partisipasi politik perempuan di parlemen. Penelitian terdahulu dapat disimpulkan kegagalan caleg perempuan dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu sosial budaya masyarakat salah satunya patriarki dan proses/ lembaga politik (Budi Rajab, 2018 dan Oktaviani Suciptaningsih, 2010). Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri kegagalan keterpilihan perempuan dalam pemilihan legislatif dari sudut pandang modalitas individu caleg perempuan. Juga bentuk partisipasi politik perempuan ini jika dimobilisasi seperti apa dampaknya pada budaya politik lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif artinya humanistik atau non-numerik, karena berkaitan dengan pengalaman, sikap, pandangan dan motivasi yang dimiliki oleh subjek penelitian. Data penelitian dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara kepada informan yaitu enam orang sebagai caleg perempuan dan empat orang masyarakat umum. Untuk penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang berasal dari studi dokumen. Teknik analisis data yang telah diperoleh menggunakan teori Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi/ penarikan kesimpulan. Sebagai alat validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Politik Yang Dimobilisasi

Tingkat partisipasi politik perempuan dalam Daftar Calon Tetap pemilihan legislatif di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2019 telah melebihi 30% keterwakilan perempuan. Namun tidak ada kandidat perempuan yang berhasil lolos di kursi DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Beberapa perempuan yang menjadi caleg adalah bukan kader partai, mereka diajak bergabung ke partai politik sebelum pendaftaran

di KPU. Informan lainnya juga mengakui hal yang sama, bahwa mereka bergabung dalam politik pertama kali melalui partai yang mengusung. Berbicara partisipasi politik tentu dibarengi dengan intensitasnya. Artinya, individu secara aktif meluangkan sepenuh waktu untuk terlibat dalam kegiatan politik, agenda politik dan tergabung dalam jaringan sosial seperti kelompok aktivis, koalisi dan lembaga lainnya. Hal ini didukung oleh Charles Andrain dan James Smith (dalam Kacung Marijan, 2010) bahwa partisipasi yang lebih aktif adalah sejauh mana individu terlibat aktif di dalam organisasi atau asosiasi yang ada. Sebagian caleg perempuan di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2019 minim terlibat dalam kegiatan politik dan organisasi lainnya.

Partisipasi politik perempuan pada pemilihan legislatif di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2019 adalah partisipasi politik yang dimobilisasi. Status menjadi caleg tidak datang dari motivasi perempuan sendiri melainkan dorongan pihak luar seperti kerabat dan elite politik.

Sebenarnya waktu itu persiapannya tidak terlalu matang, jujur tahun 2019 itu adalah baru setengah hati saya untuk ikut caleg, sehingga *last minute* banget untuk kampanye. Untuk tim tidak ada yang solid dan kuat, bahkan ga ke semua lokasi kita pergi untuk kampanye. Sehingga saya tidak terlalu memporsi diri saya secara maksimal. Karena dari diri sendiri belum terlalu percaya diri, belum yakin bisa tampil, belum terlalu mengenal daerah pemilihan. (Wawancara dengan Rapta Saleleubaja, 20 Maret 2023).

Indikasi lain partisipasi politik perempuan yang dimobilisasi adalah pemberian nomor urut yang tidak strategis oleh partai. Dalam kajian Perludem (Wulandari dan Agustyati dkk, 2013) mengatakan perempuan sadar bahwa mereka hanya sebagai pelengkap dan hanya untuk mematuhi regulasi, sehingga caleg perempuan menurut apa yang diperintahkan oleh partai karena memang mereka juga tidak memiliki ambisi untuk menjadi calon terpilih.

Kapasitas Individu Caleg Perempuan Yang Rendah

Tabel 2 Faktor Kegagalan Caleg Perempuan

No	Nama Caleg	Faktor Penyebab Kekalahan Caleg Perempuan				
		Modal Sosial	Modal Politik	Modal ekonomi	Motivasi	Sosial Budaya
1	Agnes Senita	✓	✓	✓	✓	✓
2	Rapta Saleleubaja		✓		✓	✓
3	Imas Herawati		✓			✓
4	Esterlia S	✓		✓	✓	✓
5	Dian Ningsih	✓	✓	✓	✓	✓
6	Hermawati S		✓			✓

Modal Sosial :

Organisasi yang diikuti oleh caleg perempuan condong pada organisasi non-partai. Beberapa informan memiliki jabatan dalam jaringan sosial seperti penanggung jawab dan bendahara. Rapta Saleleubaja merupakan kandidat yang memiliki jaringan sosial namun minim melibatkannya, ia mengandalkan latar sosial lainnya yaitu sebagai anak Bupati pertama Kepulauan Mentawai. Rapta mampu mengumpulkan suara lebih tinggi dari caleg perempuan lainnya yaitu 218 (dua ratus delapan belas). Putnam (dalam Rusydi Syahra, 2003) mendefinisikan modal sosial sebagai organisasi sosial yang memiliki jaringan kerja dan norma-norma sehingga menciptakan kepercayaan sosial bagi sesama anggota, kemudian menjadi langkah untuk memperoleh *benefit* bersama. Peran organisasi sosial yang dimiliki beberapa caleg perempuan minim pada keterpilihannya. Salah satu kelalaian aktor ketika tidak melibatkan jaringan sosial dengan serius untuk mendukung dalam pemilihan. Dikutip dari hasil wawancara Agnes senita, “organisasi OMK saya tidak melibatkan mereka, hanya memberikan sosialisasi saja kalau mereka mau pilih terserah mereka. Adapun teman-teman dekat satu dua orang”, (29/11/2022). Lins (dalam Syamni, 2010) menjelaskan kapasitas modal sosial di level mikro yang berdampak pada perolehan kekuasaan seseorang. Penjelasan tersebut adalah ketika seseorang memiliki modal sosial dengan baik, otomatis mendapatkan reputasi, kemakmuran dan kekuasaan.

Modal Politik :

Modal politik dalam penelitian ini berkaitan dengan rekam jejak caleg perempuan di dalam partai politik dan *networking* yang sudah dibangun bersama elite politik, dan penguasa yang berpengaruh. Matland (dalam Nurafifah & Fitriyah, 2021) menyebutkan seseorang yang ingin menjadi calon anggota legislatif harus menempuh 3 (tiga) tahap, pertama adalah seleksi diantara politisi perempuan, kedua proses seleksi yang dilakukan oleh partai politik, ketiga seleksi oleh pemilih pada saat pemilihan. Perempuan pada pemilihan legislatif di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2019 merupakan calon yang diajukan oleh partai politik. Pada pemilihan legislatif di Kabupaten Kepulauan Mentawai beberapa caleg perempuan tidak merasa sulit ketika proses pencalonan. Karena memang semua administrasi pendaftaran di KPU ditanggung oleh partai politik. Disebutkan oleh informan,

Puji Tuhan selama ini menjadi keterwakilan perempuan dari Gerindra saya tidak susah dan tidak sulit melewati menjadi anggota DPRD atau calon anggota DPRD, menjadi 30% keterwakilan saya tidak pernah susah mendaftar atau mengikuti tes-tes yang lainnya Puji Tuhan lancar dan tidak sulit. (Wawancara dengan Hermawati, 13 April 2023).

Modal politik menurut Halim (dalam Nurafifah dan Fitriyah, 2021) adalah jaringan politik calon dan partai politik, dalam hal ini hubungan jaringan politik yang dimiliki calon dengan pengurus, calon dengan tim sukses dan pengurus dengan partai politiknya. Salah satu informan yaitu Hermawati Siritoitet memiliki modal politik sebagai calon perempuan petahana, ia menjadi Dewan PAW pada tahun 2018. Masa jabatan sebagai anggota dewan kurang lebih 1 (satu) tahun dan pengalaman sebagai kader partai gagal dikelola oleh Hermawati sebagai modal politik, ia mengakui persiapan kampanye memang tidak maksimal dan banyak tantangan ketika turun ke lapangan.

Modal Ekonomi :

Modal ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab kekalahan perempuan pada pileg, hal ini menunjukkan masih ada kemiskinan pada perempuan itu sendiri. Kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai juga mengharuskan para caleg untuk mengeluarkan biaya yang tinggi supaya dapat sampai ke pelosok-pelosok dapil untuk melakukan kampanye. Hambatan modal ekonomi dijelaskan oleh salah satu informan,

“kurangnya dana, atribut, spanduk, sosialisasi, kampanye, ketika turun ke dapil juga sulit sekali untuk ditempuh, dipengaruhi oleh kondisi Geografis”, (13/04/2023).

Gambar 1 Kondisi salah satu transportasi laut di Mentawai



Hasil penelitian di lapangan mengatakan bahwa caleg perempuan yang memiliki modal ekonomi walaupun sedikit dan yang tidak memiliki, dalam proses pemilihan legislatif mengalami kegagalan. Dapat dikatakan beberapa caleg perempuan di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tidak memiliki modal ekonomi juga tidak memiliki tim sukses, saksi dan dukungan yang besar. Akhirnya turun ke lapangan untuk kampanye saja tidak dilakukan, sehingga hanya mampu memperoleh 4 (empat) suara oleh Dian Ningsih ketika diwawancarai.

Motivasi :

Berbicara motivasi perempuan menjadi caleg di Kabupaten Kepulauan Mentawai hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa perempuan yang maju pada pemilihan legislatif tidak berasal dari diri sendiri, melainkan ajakan elite politik, saudara atau keluarga. Kesadaran dan keyakinan seseorang akan mempengaruhi motivasinya dalam melakukan sesuatu misalnya kompetisi pemilihan legislatif. Artinya seseorang bisa memaksimalkan usahanya ketika ada keinginan besar dari dalam diri dan disertai dengan dukungan persiapan yang maksimal.

Tabel 3 Motivasi Perempuan Sebagai Caleg

No	Nama Caleg	Partai Politik	Motivasi Menjadi Caleg		Alasan Menjadi Caleg
			Diri Sendiri	Orang Lain	
1	Agnes Senita	Demokrat		✓	1. Diajak saudara 2. Dekekan kerja 3. Ingin membuka lowongan pekerjaan perempuan
2	Rapta Saleleubaja	Garuda		✓	1. Diajak elite partai 2. Program perkebunan tanaman atsiri
3	Imas Herawati	PDI-P		✓	1. Diajak elite partai 2. Menyuarakan kebutuhan masyarakat
4	Esterlia	Perindo		✓	1. Diajak elite partai
5	Dian Ningsih	Nasdem		✓	1. Diajak elite partai
6	Hermawati S	Gerindra	✓		1. Mantan dewan PAW 2. Merindukan sosok perempuan di Legislatif

Motivasi juga dipengaruhi oleh kualitas perempuan yang belum mumpuni untuk menjadi wakil rakyat di Perlemen. Sehingga mereka tidak memiliki kepercayaan diri, “pada saat kampanye saya memberitahukan iniloh program kita, namun di dalam diri saya belum percaya dan matang”, (Wawancara Rapta Saleleubaja, 20/03/2023).

Konteks Sosial-Budaya : Hambatan Politik Bagi Perempuan

Masyarakat Mentawai masih terkungkung pada budaya yang mengutamakan laki-laki dan menomor duakan perempuan pada proses pengambilan keputusan. Informan menjawab terkait budaya patriarki di masyarakat Mentawai, “kalau dalam peran kepemimpinan politik di Kabupaten Kepulauan Mentawai menurut saya masih kuat, karena sejauh ini belum ada satu-pun perempuan yang duduk di kursi DPRD kab. Kep. Mentawai” (Wawancara dengan Ajes, 23/05/2023). Oktarina Soraya (2018) mengatakan dalam penelitiannya bahwa tantangan eksternal organisasi Bundo Kandung dalam mendorong keterwakilan perempuan di DPRD adalah masih kentalnya budaya patriarki yang berlaku di masyarakat Sumatera Barat, tidak ada ruang-ruang pergerakan bagi perempuan, dan stigmatisasi bahwa politik itu hanya ranah laki-laki. Indikasi terbatasnya ruang pergerakan perempuan dapat dilihat secara kritis ketika caleg perempuan

berkampanye. Salah satu informan dalam penelitian ini menjelaskan ketika berkampanye hanya di ruang-ruang lingkup perempuan.

Saya melakukan strategi bermasyarakat, penjelasan sendiri kepada masyarakat karena memang hal itulah yang menjadi strategi yang lebih baik sebagai perempuan, lalu mengikuti ibadah karena di sini kita mayoritas Kristen jadi ada ibadah perempuan, ada kegiatan perempuan, ada kegiatan-kegiatan olahraga seperti voli dan lain sebagainya, jadi saya memang tertarik dan memang pendekatan diri kepada masyarakat khususnya kaum perempuan. (Wawancara dengan Hermawati, 13 April 2023).

Indikasi lain budaya patriarki adalah bentuk dukungan masyarakat yang minim terhadap perempuan dapat dilihat dari perolehan pendanaan politik. Hasil penelitian di lapangan menyatakan beberapa informan yang mengakui memiliki modal ekonomi bersumber dari dana pribadi.

Makna Keterwakilan Perempuan 0% di Parlemen

Selain itu, saat ini memang sulit untuk meyakinkan masyarakat betapa pentingnya perempuan hadir di politik (Parlemen) khususnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Karena memang di parlemen tersebut belum pernah ada perempuan yang berhasil menjadi anggota DPRD sebagai hasil pemilu. Jarang ada *role model* yang memberikan motivasi, mengangkat isu perempuan dan pembawa perubahan di masyarakat. Permasalahan kesehatan di masyarakat Mentawai seperti stunting. Dikutip dari mentawai.go.id (2022) survey status gizi balita di Kabupaten Kepulauan Mentawai berada pada angka 27,3 persen. Pentingnya perempuan hadir di dunia politik memiliki banyak kontribusi dalam memperjuangkan kaum-kaum yang tidak terjamah oleh mereka yang saat ini berada di Parlemen. Kekosongan perempuan di DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai mengindikasikan rendahnya kesempatan aktif perempuan untuk mempengaruhi kebijakan, masih banyak permasalahan di masyarakat Mentawai yang tidak dapat diatasi oleh wakil rakyat saat ini.

Permasalahan lain yaitu kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan masih terjadi di Mentawai, masyarakat kurang mendapatkan pendidikan dan sosialisasi anti kekerasan seksual. Disampaikan pada halaman liputan6.com, Bupati Kepulauan Mentawai geram terhadap maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi. Permasalahan seperti ini hanya bisa dirasakan oleh perempuan, artinya ada beberapa masalah hanya dapat diatasi oleh mereka sendiri (perempuan). Kepemilikan modal dalam kontestasi

politik sangat signifikan, artinya kapasitas modal memang harus dimiliki perempuan jika ingin menang dalam pemilu. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa diantara informan yang ada perolehan suaranya berbeda-beda. Rapta, Imas dan Hermawati meraih jumlah suara tertinggi dari yang lain. Berdasar latar belakang sosial, kepemilikan modal politik dan ekonomi informan ini mampu mengumpulkan suara lebih baik dari pada yang tidak memiliki modal sama sekali. Sehingga dapat dikatakan selain dukungan eksternal, seorang kandidat harus memperlengkapi kapasitas internal terlebih dahulu.

Hubungan Antara Kapasitas dan Kekalahan Caleg Perempuan

Kapasitas perempuan di Mentawai jika dilihat dari data statistik, IDG berada di angka 48,36 pada tahun 2019. Artinya terlaksananya kesetaraan dan keadilan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi di Mentawai masih rendah. Selain itu, IPM perempuan kurang dari 60 artinya pembangunan kualitas hidup (kesehatan, pengetahuan dan kehidupan yang layak) masih rendah. Berdasarkan data ini menunjukkan bahwa perempuan-perempuan di Mentawai masih tertinggal dari berbagai aspek. Mahalnya ongkos politik pada sistem pemilu proporsional mengintruksikan setiap calon harus memiliki modal ekonomi yang memadai. Artinya butuh kemampuan finansial ketika maju dalam kontestasi politik. Ketika modal ekonomi terbatas maka mesin pergerakan politik juga terhambat, akibatnya banyak masyarakat yang tidak mengenal kandidat-kandidat perempuan karena jarang melakukan kampanye/ promosi citra politik.

Keterbatasan modal ekonomi perempuan dalam pemilihan umum juga dipengaruhi oleh kondisi finansial keluarga, sebut saja seorang ibu yang hendak mencaleg memiliki anak dan membutuhkan biaya sekolah, sang ibu lebih mendahulukan kebutuhan anak dan keluarganya. Gagalnya caleg perempuan di Kabupaten Kepulauan Mentawai juga disebabkan oleh serangan-serangan fajar para pemilik modal besar dan *incumbent*. Artinya para petahana lebih dilirik oleh pemilih karena dinilai telah memiliki modal besar dari pada caleg perempuan pemula (Giscka Canna Indira S dan Chusnul Mariyah, 2021). Beban ganda, ketika perempuan hendak terjun ke dunia politik tidak luput dari perannya sebagai Ibu dalam rumah tangga, caleg perempuan dalam penelitian ini adalah mereka yang masuk politik setelah mendapat persetujuan dari suami dan keluarga. Banyak pertimbangan yang dilakukan oleh perempuan sebelum masuk ke politik, seperti kondisi keuangan dan kebutuhan anak dan orang tua, jadi pertama yang dilewati adalah dukungan

keluarga (wawancara informan). Pendapat ini serupa yang disampaikan oleh Halida Nabila Salfa (2023) dalam penelitiannya mengatakan bahwa peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen terus dilakukan oleh pemerintah, namun selalu mengalami hambatan karena memang perempuan harus memiliki kemauan, kemampuan finansial dan ijin dari keluarga supaya dapat masuk ke parlemen.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan kegagalan caleg perempuan pada pemilihan legislatif di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2019 disebabkan oleh dua faktor yaitu, *pertama* kapasitas caleg perempuan yang rendah sehingga tidak dipilih oleh masyarakat. *Kedua*, kondisi sosial budaya yang menunjukkan minim dukungan terhadap perempuan masuk politik. Rendahnya keberpihakan partai politik pada perempuan juga menjadi hambatan kesuksesan dalam dunia politik, selain itu kondisi seperti tidak memiliki jaringan sosial, kekurangan modal ekonomi, tidak memiliki pengalaman politik, serta dukungan yang rendah oleh masyarakat. Partisipasi perempuan dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah partisipasi politik yang dimobilisasi. Motivasi yang rendah dapat mempengaruhi ambisi seseorang untuk mencapai tujuannya, cenderung caleg perempuan tidak percaya diri untuk menjadi seorang pemimpin. Sehingga yang terjadi tidak ada caleg perempuan yang benar-benar berjuang maksimal untuk mendapatkan kursi di parlemen Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Penulis memberikan rekomendasi berdasarkan permasalahan yang terjadi di lapangan, *pertama* adalah pembuatan kebijakan oleh Komisi Pemilihan Umum dan legislatif untuk mendorong pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon dengan standar merujuk pada kualitas dan kapasitas. Tujuannya supaya parpol tidak merekrut sembarang calon perempuan, dengan mempersiapkan kader-kadernya untuk menjadi petarung. Sehingga calon perempuan yang hadir dalam persaingan politik tidak sekedar memenuhi kuota, tetapi juga memiliki kapasitas memobilisasi pemilih. Rekomendasi *kedua* adalah lembaga yang berwenang seperti KPU, Bawaslu, Kesbangpol, dan organisasi perempuan di Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk dapat memberikan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat secara bertahap. Rekomendasi *ketiga* yaitu bagi peneliti selanjutnya, tak kalah penting topik yang perlu

diteliti adalah strategi pemenangan bagi kandidat perempuan di Mentawai. Walaupun belum ada perempuan yang berhasil masuk ke parlemen, tetapi peneliti dapat melakukan studi pustaka dengan hasil penelitian di tempat lain

UCAPAN TERIMAKASIH

1. Terimakasih penulis sampaikan pada Civitas Akademik FISIP UNDIP Semarang.
2. Ibu Dr. Sos. Dra. Fitriyah, MS, selaku pembimbing pertama yang memberikan bimbingan dan arahan setelah menguji proposal penelitian sampai pada penyelesaian tulisan ini
3. Bapak Hendra Try Ardianto, S.IP., M.A, selaku dosen pembimbing kedua yang memberikan bimbingan dan arahan luar biasa dari penulisan proposal penelitian sampai pada penyelesaian.
4. Bapak Budi dan Tenaga Ahli DPP Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, yang telah memfasilitasi kami mahasiswa terkait kemahasiswaan.
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai dan seluruh tenaga ahli yang telah memberikan ijin atas pengambilan data terkait pemilu legislatif tahun 2019.
6. Ibu Imas Herawati, selaku informan dalam penelitian ini sebagai Caleg Perempuan dari PDI Perjuangan Dapil Mentawai 1 tahun 2019.
7. Ibu Hermawati Siritoitet, S. Kep, selaku informan dalam penelitian ini sebagai Caleg Perempuan dari Partai Gerindra Dapil Mentawai 1 tahun 2019.
8. Ibu Dian Ningsih, S.Pd, selaku informan dalam penelitian ini sebagai Caleg Perempuan dari Partai Nasdem Dapil Mentawai 3 tahun 2019.
9. Ibu Agnes Senita, S.Pd, selaku informan dalam penelitian ini sebagai Caleg Perempuan dari Partai Demokrat Dapil Mentawai 1 tahun 2019.
10. Ibu Esterlia Saogo, S.Th, selaku informan dalam penelitian ini sebagai Caleg Perempuan dari Partai Perindo Dapil Mentawai 1 tahun 2019.
11. Ibu Rapta Saleleubaja, selaku informan dalam penelitian ini sebagai Caleg Perempuan dari Partai Garuda Dapil Mentawai 2 tahun 2019.
12. Ibu Seminar Siritoitet selaku Ketua PDD AKN Kabupaten Kepulauan Mentawai, juga sebagai informan dalam penelitian ini.
13. Ibu Ajes selaku informan dalam penelitian ini, yang telah membantu peneliti memberikan pandangan terhadap budaya yang ada di Mentawai
14. Bapak Iswanto (Pak Lek), selaku informan dalam penelitian ini juga sebagai Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2018-2023.
15. Kak Yosafat Wakil Ketua FORMMA Sumatera Barat selaku informan dalam penelitian ini, dan teman-teman yang sedang berkecimpung dalam FORMMA SUMBAR

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, U. N. D. P. (2010). Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintahan. Makalah Kebijakan. Jakarta: UNDP Indonesia.
- Marijan, Kacung. 2010. Sistem Politik Indonesia : konsolidasi demokrasi pasca-orde baru. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Nurafifah, N. L., & Fitriyah, F. (2021). Keberpihakan Semu dalam Pencalonan: Kegagalan Calon Legislatif Perempuan Nomor Urut 1. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 3(2), 27-38.
- Nuzula, S., & Mujibussalim, M. (2017). Partisipasi Politik Perempuan di Parlemen Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 2(4).
- Oktarina, S. (2018). Tantangan Organisasi Bundo Kanduang Dalam Mendorong Representasi Perempuan Di Lembaga Legislatif Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Komunikasi Acta Diurna*, 14(2), 48-83.
- Salfa, H. N. (2023). Peran Sosial Perempuan dalam Masyarakat dan Implikasinya terhadap Penempatan Perempuan Anggota Legislatif Pada Komisi-Komisi di DPR RI Periode 2019-2024 [Women's Social Role in Society and Its Implication to The Division of Job of Women's MP]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 13(2), 162-181.
- S, Giscka Canna Indira. Dan Chusnul Mariyah. (2021). Analisis Modal Politik, Sosial dan Ekonomi Terhadap Keterpilihan Caleg Perempuan Pemula Pada Pileg DPRD DKI Jakarta 2019. *TheJournalish: Social and Government*, 2(2), 56-63.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung : Alfabeta. Hal 219-267.
- Surbakti, R. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT. Grasindo.
- Syahra, R. (2003). Modal sosial: Konsep dan aplikasi. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 5(1), 1-22.
- Syamni, G. (2010). Profil Social capital suatu kajian literatur. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 17(2).
- Wulandari, L. dan K. Agustyati, dkk. (2013). Pencomotan Perempuan Untuk Daftar Calon: Rekrutmen Calon Anggota Dprd Kabupaten/Kota Untuk Memenuhi Kuota 30% Perempuan Dalam Pemilu 2014. Jakarta: Yayasan Perludem